



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL DI DESA GUMPA KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR (STUDI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN)

Nurmalasyiah, Sumburwati*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong
Kode Pos 70123 Telp./Fax (0526) 2022484

ABSTRAC

By Minister of Internal Affairs Instruction 542/3150 / SJ on Implementation pembangian Social Security Card and Handling Public Complaints that the Social Protection Card (KPS) is a card issued by the Government as a marker of poor households. PPP contains information other household members, household address, family card numbers, equipped with a bar code (barcode) and KPS unique identity number. The front of the card reads Social Protection with Garuda logo and card expiration.

The purpose of writing this study is to identify and analyze Implementation of Social Protection Card Program In the village hamlet Gumpa Eastern District of East Barito District (Study Help Poor Students).

The research method using descriptive qualitative approach, data collection was done by interview using the theory Grindle, respondents used is of poor students who receive assistance, data analysis techniques using the theory Milles, Huberman and Saldana, 2014

Protection Card Gumpa In the village of Dusun Eastern District of East Barito District (Study Help Poor Students) already performing well. However, there are some that are a barrier that is the less accurate data collection on poor students, the use of funds BSM is not maximized, because it is used for other purposes.

So the hope is that this program viable or sustainable, with the correct data collection in accordance with the facts on the ground.

Keywords: Implementation, Program Policy KPS



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

PENDAHULUAN

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat (Abidin, 2002: 185) atau kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak diimplementasikan (Udoji dalam Putra, 2001: 79). Pada titik ini, implementasi atau langkah pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting tetapi tidak berarti bahwa telah terlepas dari proses formulasi sebelumnya, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan, disamping itu ketidakjelasan kebijakan adalah sebab utama kegagalan pelaksanaan (Palumbo dalam Putra, 2001: 80).

Pelaksanaan sangat penting dalam

suatu pemerintahan (Abidin, 2002: 58) dan mekanisme operasional kebijakan tidak



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

hanya berkaitan dengan prosedur-prosedur teknis administratif belaka, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah politik seperti konflik keputusan, dan tanggapan kelompok sasaran.

Secara sederhana, implementasi merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses penerjemahan pernyataan kebijakan ke dalam aksi kebijakan (Cooper, 1998: 185). Pemahaman seperti ini berangkat dari pembagian proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahap di mana implementasi berada di tengah-tengahnya.

Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses yang terjadi setelah sebuah produk hukum dikeluarkan yang memberikan otorisasi terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan non-tindakan) oleh berbagai aktor,

terutama birokrasi, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan (Ripley & Franklin, 1986: 4; Shafritz & Russell, 1997: 58).

Definisi yang lain diberikan oleh Malcolm L. Goggin (1990). Dengan



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

menggunakan pendekatan komunikasi, para penulis ini melihat implementasi sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandat yang telah ditetapkan. Implementasi, dalam pandangan mereka, sering disejajarkan dengan ketaatan negara, atau suatu pemenuhan tuntutan prosedur hukum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Implisit dalam pernyataan tersebut adalah tidak adanya modifikasi atau perubahan terhadap suatu keputusan kebijakan yang justru dapat bertentangan dengan maksud para pembuat kebijakan (Goggin, 1990: 34).

Hampir senada dengan pendapat-pendapat di atas, Merilee Grindle menyatakan bahwa implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan "*policy delivery system*" yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output atau outcomes tertentu (Grindle, 1980: 6).

Berdasarkan Instruksi Mendagri No. 541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan

Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat bahwa



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Implementasi kebijakan berdasarkan teori Grindle (1980 : 7) mengatakan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil

tergantungan kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks implementasinya). Berdasarkan fakta di lapangan terdapat beberapa permasalahan

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

dalam pelaksanaan program KPS di Desa Gumpa yang diantaranya penerima KPS tidak tepat sasaran dan semakin bertambahnya masyarakat yang mengaku miskin supaya mendapat bantuan dari program KPS.

Alasan penggunaan model Grindle pada penelitian ini dikarenakan model Grindle sangat cocok untuk diterapkan di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur jika dilihat dari isi kebijakan dan implementasi model Grindle dan Implementasi Kebijakan Kartu Perlindungan Sosial (Studi Bantuan Siswa Miskin).

Tabel 1.1 Daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Bantuan KPS Desa Gumpa T.A 2015

No	Nama	Data Anak Sekolah		
		SD	SMP	SMA
1	Adi	1	-	-
2	Alisna	1	1	-
3	Anye	-	-	-
4	Atisman	-	1	1
5	Dandi	1	1	1
6	Ginjut	-	-	-
7	Kardianto	1	-	-
8	Karman	3	-	1
9	Mandet	-	-	-
10	Merliati	1	-	-
11	Misto	-	-	-
12	Nawen	-	-	-

13	Nendui	1	2	-
14	Punden	-	-	-
15	Sabdianto	1	-	-
16	Supandi	1	-	-
17	Tambun	2	1	1
18	Tumis	1	-	-
19	Wakik	-	1	1
20	Weliya	-	-	1
Jumlah		14	7	6

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel di atas terdapat 20 Rumah Tangga Sasaran Penerima Bantuan KPS dengan 27 siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin dengan klasifikasi 14 orang dari tingkat SD, 7 orang dari tingkat SMP dan 6 orang dari tingkat SMA.

Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial ini kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia. Kartu Perlindungan Sosial dikirimkan langsung ke alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh PT Pos Indonesia.

Adapun syarat dan ketentuan penyampaian KPS ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Rumah Tangga beserta seluruh Anggota Rumah Tangga berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

2. Penerima Program Bantuan Sosial harus dapat menunjukkan kartu ini pada saat pengambilan manfaat program. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga tidak membatalkan pengambilan manfaat program.

3. Kartu ini harus disimpan dengan baik. Kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggungjawab Pemegang Kartu.

4. Kartu tidak dapat dipindahtangankan.

Program BSM adalah salah satu Program Nasional berupa pemberian bantuan uang tunai secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (yaitu sekitar 15,43 juta siswa untuk Tahun Pelajaran 2013/2014) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Eefektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat (4) strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Menyempurnakan program perlindungan social



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
3. Pemberdayaan masyarakat, dan
4. Pembangunan yang inklusif atau pembangunan yang terencana

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga klaster, masing-masing:

1. Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
2. Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
3. Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang digunakan untuk Kartu Perlindungan Sosial bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir

PPLS pada tahun 2011.

1. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data RTS, metodologi pendataan RTS disempurnakan, yang mana penyempurnaan metodologi tersebut

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

dikoordinasikan oleh TNP2K. Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K untuk diolah sehingga menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian dikelola sebagai Basis Data Terpadu (BDT).

2. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), diputuskan bahwa KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%. Maka, pemberian KPS tidak hanya mencakup mereka yang miskin namun juga mencakup mereka yang rentan.
3. Siswa dari Rumah Tangga/Keluarga pemilik KPS (Kartu Perlindungan Sosial) pada tahun 2013 berpotensi menjadi Penerima Program BSM dan menerima manfaat dari Program BSM tersebut di tahun 2014 (Semester 2-Tahun Ajaran 2013/2014, dan Semester 1-Tahun Ajaran 2014/2015).
4. Siswa yang berasal dari Rumah Tangga pemilik KPS (asli atau fotokopi) ke Sekolah/Madrasah tempat siswa

terdaftar disertai salah satu bukti tambahan.



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Berdasarkan Instruksi Mendagri No. 541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat bahwa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang ada di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur adalah :1. Penerima Kartu Perlindungan Sosial tidak tepat sasaran. 2. Semakin banyak masyarakat yang mengaku miskin supaya

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

mendapat bantuan dari program Kartu Perlindungan Sosial. Hal ini juga ikut didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ;

1. Alifiandra Azhar Putri, melakukan penelitian tentang Efektivitas Kompensasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Buruh Tani Di Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Dari hasil penelitian tersebut terdapat enam poin penting, yaitu :

- a. Program kompensasi kenaikan harga BBM memiliki efektivitas sedang dengan tercapainya tujuan dan sasaran sebesar 58%.
- b. Mayoritas responden memiliki jumlah anggota rumah tangga bekerja sebanyak 2 – 3 orang.
- c. Aksesibilitas atau kemudahan terhadap program kompensasi kenaikan harga BBM berbeda untuk setiap bantuan.
- d. Derajat hubungan antar program kompensasi kenaikan harga BBM dengan peningkatan kesejahteraan pada taraf 95%.
- e. Pada taraf kepercayaan 95% terhadap hubungan yang signifikan antara kegiatan berburuh tani dengan peningkatan kesejahteraan.

f. Pada taraf kepercayaan 95% terdapat hubungan yang signifikan antara

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

jumlah anggota rumah tangga dengan peningkatan kesejahteraan.

(BBM) (X₂) adalah sebesar - 0,140 dan nilai t hitung (- 2,089) < dari pada t tabel (-1,661).

2. Adi Rahman, Azis Fatoni dan Maria Mimin Minarsih, melakukan penelitian tentang Pengaruh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus di Kelurahan Banyumanik Kota Semarang).

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Banyumanik Kota Semarang ada pengaruh positif signifikan dari variabel Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) terhadap kesejahteraan

nilai koefisien regresi untuk variabel Bantuan Langsung Sementara M

- b. Ada pengaruh negatif signifikan dari variabel kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Banyumanik Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi untuk variabel kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

- c. Ada pengaruh yang signifikan dari variabel Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Banyumanik Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung (13,082) > F tabel (3,091) dan sign (0,000) < sign α (0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Sujianto, Ernawati, Hasim As'ari dan Mayarni, melakukan penelitian tentang Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dari hasil penelitian bahwa penyaluran Raskin di Desa Rantau Baru berjalan dengan kurang baik. Hal ini karena pada saat proses penyaluran masih bisa ditemukan beberapa kendala yang sedikit banyak bisa menghambat proses penyalurannya. Dari semua tahapan penyaluran saling berhubungan satu dengan yang lainnya, karena jika salah satu dari proses tidak berjalan dengan baik, maka proses penyaluran Raskin pun akan terhambat. Proses pendistribusian Raskin di Desa Rantau Baru sudah baik dan benar menurut Pedoman Umum Raskin. Proses ini dimulai dari SPA dari Pemkab

Pelalawan kepada Perum Bulog, kemudian Perum Bulog mengeluarkan



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

SPPB untuk pihak kecamatan yang kemudian diserahkan kepada Satker Raskin.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kartu

Perlindungan Sosial Di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur (Studi Program Bantuan Siswa Miskin)?”

METODELOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis menyajikan data dengan kata-kata, gambaran, naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen. Lokasi sebagai tempat peneltian ini pada Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Fokus Penelitian, adalah ;1. Implementasi Kebijakan Kartu Perlindungan Sosial di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur (Studi Bantuan Siswa Miskin). 2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan

Kartu Perlindungan Sosial di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur (Studi Bantuan Siswa Miskin).

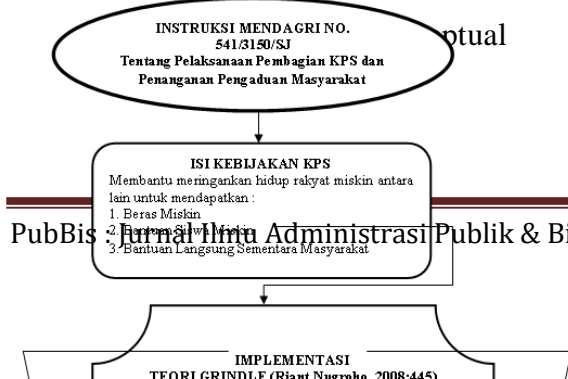
Instrumen dalam penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan. Pada observasi

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

peneliti menggunakan kamera digital, sedangkan pada saat interview peneliti menggunakan *Handphone (HP)* sebagai alat perekam dan juga pedoman wawancara. Informan Penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Kantor Desa, sedangkan key informan adalah Ketua RT II dan 3 masyarakat yang menerima bantuan Kartu Perlindungan Sosial.

Metode Pengumpulan data untuk penelitian ini penulis mengemukakan beberapa cara atau tehnik pengumpulan data, yaitu : 1. Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu tehnik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai partisipan atau nonpartisipan. Dengan tehnik observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran langsung dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 2. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan penelitian. 2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data atau informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga / instansi atau perorangan.

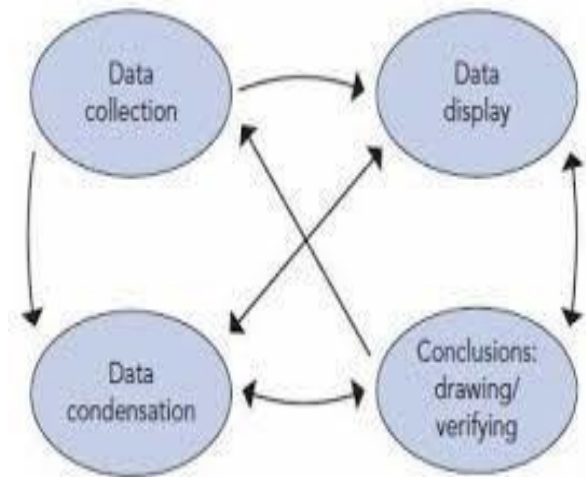
Kerangka Konseptual



Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, 2014 : 14 meliputi empat komponen, diantaranya : Pengumpulan data, Penyajian data, Reduksi data Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Konsep analisa data kualitatif tersebut dapat terlihat pada bagan berikut :

Gambar 3.1
Analisa Data Model Interaktif



Sumber : Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14

Keterangan :

- Reduksi data yaitu Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan lapangan, wawancara dan dokumentasi.
- Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

- c. Kesimpulan, penarikan atau verifikasi dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Kartu Perlindungan Sosial

1. Berdasarkan hasil observasi di lapangan adalah sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Indikator	Jawaban
1	Bagaimanakah kebijakan yang diterapkan dalam penetapan sasaran BSM di desa Gumpa?	Konten	Sudah tepat
2	Bagaimanakah manfaat yang dihasilkan setelah ditetapkannya sasaran BSM?		Cukup baik
3	Bagaimanakah status derajat penerima sasaran setelah terlaksananya bantuan sosial seperti BSM?		Cukup membantu
4	Bagaimanakah kedudukan pembuat kebijakan sasaran BSM tersebut?		Baik
5	Siapakah pelaksana program atau pengarah program BSM di desa Gumpa?		Sudah sesuai
6	Bagaimanakah sumber daya yang dikerahkan untuk pelaksanaan (pendataan) di desa Gumpa?		Sangat baik

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

1	Bagaimanakah kepentingan strategis orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan BSM?	Konteks	Baik
2	Bagaimanakah sikap pelaksana kegiatan BSM di desa Gumpa?		Sangat baik
3	Bagaimanakah kepatuhan dan daya tanggap pelaksana BSM menurut saudara?		Sangat sesuai

Implementasi Kebijakan Kartu Perlindungan Sosial di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu :

1. Indikator Konten

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa dengan kebijakan yang diterapkan dalam penetapan sasaran di Desa Gumpa sudah tepat dan dijalankan dengan cara yang sederhana yakni dengan cara rapat untuk penetapan sasaran BSM sesuai dengan yang mendapatkan KPS dan pemerintahan desa mendata masyarakat yang tidak mampu serta menetapkan sebagai

a. manfaat yang dihasilkan setelah ditetapkannya sasaran BSM?

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa manfaat yang dihasilkan setelah ditetapkan sasaran BSM sangat baik yakni bantuan digunakan untuk biaya pendidikan. Namun disisi lain ada keluarga yang mempergunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan pokok dan bukan untuk keperluan sekolah. Hal ini tidak tepat dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

b. status derajat penerima sasaran setelah terlaksananya bantuan sosial seperti BSM?

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa status derajat Rumah Tangga Sasaran (RTS).



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

penerima sasaran
setelah

terlaksananya bantuan sosial seperti BSM yakni ada perubahan ke arah yang lebih positif walaupun tidak terlalu signifikan. Namun bantuan ini cukup membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu terkhusus dalam pembiayaan anak sekolah.

- c. kedudukan pembuat kebijakan sasaran BSM tersebut?

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa kedudukan pembuat kebijakan sasaran BSM di Desa Gumpa adalah Kepala Desa dan

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

perangkat-perangkatnya yang berkewenangan di tingkat desa.

- d. pelaksana program atau pengarah program BSM di Desa Gumpa?

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa pelaksana program atau pengarah program BSM di Desa Gumpa yakni aparatur Desa Gumpa, pengelola raskin Desa Gumpa dan BPS Kabupaten Barito Timur. Hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan BSM.

- e. sumberdaya yang dikerahkan untuk pelaksanaan (pendataan) di Desa Gumpa?

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa sumberdaya yang dikerahkan untuk pelaksanaan (pendataan) di Desa Gumpa sangat baik karena sudah dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Barito Timur dan juga beserta aparat pemerintahan Desa Gumpa yang sudah kompeten dan mengetahui bagaimana kondisi di Desa Gumpa.

2. Indikator Konteks

- a. kepentingan strategis orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan BSM?

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa tidak ada

kepentingan strategis yang terlalu berarti dalam pelaksanaan BSM

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

yang dirancang oleh pengelola BSM di Desa Gumpa dan hanya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- b. sikap pelaksana kegiatan BSM di Desa Gumpa?

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa sikap pelaksana sasaran BSM sangat baik terhadap Rumah Tangga Miskin di Desa Gumpa dan memuaskan RTM tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sudah baiknya kualitas pelaksana BSM di Desa Gumpa.

- c. kepatuhan dan daya tanggap pelaksana BSM.

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa kepatuhan dan daya tanggap pelaksana BSM sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat karena sangat patuh dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mereka kerjakan.

penelitian maka kesimpulan hasil observasi sebagai berikut :

- a. Indikator konten

- 1) kebijakan yang diterapkan dalam penetapan sasaran BSM di desa

PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil Observasi

Dari hasil observasi di lapangan sebelum dan pada saat



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Gumpa dapat dikatakan sudah tepat berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dikarenakan penetapan sasaran di Desa Gumpa dijalankan dengan yang sederhana yakni melalui forum rapat untuk penetapan BSM.

- 2) manfaat yang dihasilkan setelah ditetapkannya sasaran BSM dapat dikatakan cukup baik karena manfaat yang dihasilkan dari penetapan BSM, bantuan yang diperoleh untuk pemenuhan kebutuhan siswa namun ada saja RTM yang menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
- 3) status derajat penerima sasaran setelah terlaksananya bantuan sosial seperti BSM dapat dikatakan cukup membantu. Hal ini dirasakan warga karena dengan adanya program ini kebutuhan untuk keperluan sekolah anak mereka sangat terbantu walaupun tidak terlalu signifikan.
- 4) kedudukan pembuat kebijakan sasaran BSM tersebut dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan kedudukan pembuat kebijakan sasaran BSM di Desa Gumpa adalah Kepala Desa

beserta dengan perangkat-

Web : <https://jurnal.stiatabalongs.ac.id>

- perangkatnya
- 5) pelaksana program atau pengarah program BSM di desa Gumpa dapat dikatakan sudah baik sudah sesuai. Hal ini karena pelaksana atau pengarah program BSM di Desa Gumpa adalah pengelola pendata raskin yaitu Kepala Desa dan perangkatnya yang dibantu langsung dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur.
 - 6) sumber daya yang dikerahkan untuk pelaksanaan (pendataan) di desa Gumpa dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan sumber daya yang dikerahkan untuk pelaksanaan pendataan adalah aparat Desa Gumpa itu sendiri.

b. Indikator konteks

- 1) kepentingan strategis orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan BSM dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan tidak ada kepentingan strategis yang

- luar biasa dari orang yang terlibat yang berkewenangan di Desa Gumpa dalam pelaksanaan penetapan BSM kegiatan ini dilaksanakan dengan berjalan apa adanya dan tidak ada manipulasi data.
- 2) sikap pelaksana kegiatan BSM di desa Gumpa dapat dikatakan sangat baik. Hal tersebut

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

dikarenakan sikap pelaksana kegiatan BSM sangat baik dan hati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

- 3) kepatuhan dan daya tanggap pelaksana BSM menurut saudara dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan daya tanggap pelaksana BSM sangat sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hasil penelitian terdahulu penelitian ini memberikan kontribusi dan pengembangan terhadap pelaksanaan kegiatan program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur serta memperkaya dan mendukung penelitian oleh Adi Rahman, Azis Fatoni dan Maria Mimin Minarsih, yang menyimpulkan bahwa Pengaruh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus di Kelurahan Banyumanik Kota Semarang) terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel BLSM terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Banyumanik Kota Semarang.

Disini penulis membahas

implementasi kebijakan Kartu Perlindungan Sosial dengan model

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

implementasi Grindle (1980 : 7) menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contex of Implementation*

(konteks implementasinya). Dalam hal ini sangat erat keterkaitannya dengan indikator konten :1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*interest affected*). 2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*). 3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*). 4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*). 5. Para pelaksana program (*program implementators*). 6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources commited*).

Dari indikator konten dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KPS di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur untuk kebijakan yang diterapkan dalam

penetapan sasaran BSM di desa Gumpa dapat dikatakan sudah tepat berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dikarenakan penetapan sasaran di Desa Gumpa dijalankan dengan yang sederhana yakni melalui forum rapat untuk penetapan



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

BSM. Untuk manfaat yang dihasilkan setelah ditetapkannya sasaran BSM dapat dikatakan cukup baik karena manfaat yang dihasilkan dari penetapan BSM, bantuan yang diperoleh untuk pemenuhan kebutuhan siswa namun ada saja RTM yang menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Demikian pula untuk status derajat penerima sasaran setelah terlaksananya bantuan sosial seperti BSM dapat dikatakan cukup membantu.

Hal ini dirasakan warga karena dengan adanya program ini kebutuhan untuk keperluan sekolah anak mereka sangat terbantu walaupun tidak terlalu signifikan. Sedangkan kedudukan pembuat kebijakan sasaran BSM tersebut dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan kedudukan pembuat kebijakan sasaran BSM di Desa Gumpa adalah Kepala Desa beserta dengan perangkat-perangkatnya yang berkewenangan di Desa Gumpa. Di sisi lain pelaksana program atau pengarah program BSM di desa Gumpa dapat dikatakan sudah baik sudah sesuai. Hal ini karena pelaksana atau pengarah program BSM di Desa Gumpa adalah pengelola pendata raskin yaitu Kepala Desa dan perangkatnya yang dibantu langsung dari Badan Pusat Statistik

Kabupaten Barito Timur. Serta sumber daya yang dikerahkan untuk

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

pelaksanaan (pendataan) di desa Gumpa dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan sumber daya yang dikerahkan untuk pelaksanaan pendataan adalah aparat Desa Gumpa itu sendiri.

Indikator Konteks :1. Kekuasaan (power) dan kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved). 2. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics). 3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).

Dari indikator konteks untuk kepentingan strategis orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan BSM dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan tidak ada kepentingan strategis yang luar biasa dari orang yang terlibat dalam pelaksanaan penetapan BSM kegiatan ini dilaksanakan dengan berjalan apa adanya dan tidak ada manipulasi data. Sedangkan sikap pelaksana kegiatan BSM di desa Gumpa

dapat dikatakan sangat baik. Hal tersebut dikarenakan sikap pelaksana kegiatan BSM sangat baik dan hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana BSM menurut saudara dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan daya tanggap pelaksana BSM sangat sesuai dengan yang diharapkan.

2. Analisis Hasil Wawancara

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Berdasarkan analisa dari hasil wawancara dengan informan, maka penulis dapat memberikan pembahasan seperti di bawah ini :

- a. Sistem pelaksanaan kebijakan Kartu Perlindungan Sosial di Desa Gumpa meliputi pendataan Rumah Tangga Miskin, penetapan Rumah Tangga Miskin, dan setelah itu bantuan akan diambil langsung penerima Kartu Perlindungan Sosial di Bank Rakyat Indonesia.

Tugas dari aparat desa adalah :

- a) Bertanggung jawab dari pendataan dan penetapan Rumah Tangga miskin sesuai dengan yang sudah ditentukan.
- b) Mendampingi masyarakat dalam hal pengambilan bantuan dari bank apabila yang bersangkutan memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun kemampuan berkomunikasi.
- c) Mensosialisasikan dan melakukan pengawasan bahwa tidak ada pemotongan sedikitpun dari bantuan yang didapat.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Kepala Desa hanya memberikan informasi kepada bawahan dan Ketua RT serta ditindaklanjuti kepada masyarakat yang menerima bantuan.

Sedangkan dalam hal pengambilan bantuan, masyarakat langsung

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

mengambil dari Bank Rakyat Indonesia dengan membawa Kartu Perlindungan Sosial sebagai bukti pengambilan bantuan tersebut.

Demikian juga dengan pelaksanaan untuk Bantuan Siswa Miskin, siswa yang diprioritaskan untuk menerima program BSM adalah :

- a) Rumah Tangga Penerima Kartu Perlindungan Sosial yang telah terdaftar dalam penerima BSM.
- b) Siswa anggota Rumah Tangga Penerima Kartu Perlindungan Sosial yang belum menerima BSM dan baru mendaftar setelah penetapan penerima BSM.
- c) Siswa yang berasal dari Peserta Program Keluarga Harapan.
- d) Siswa yang berasal dari panti asuhan atau panti sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Siswa mulai dapat mengambil secara langsung bantuan dana BSM ke Bank Rakyat Indonesia dengan membawa dan menunjukkan beberapa dokumen sebagai berikut:

- a) Surat Pemberitahuan Penerima

BSM dari Kepala Sekolah/Madrasah.

- b) Bukti identitas lainnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Rapor, Ijazah, dll.

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dengan menggunakan teori Grindle (1980:7) peneliti merasa sangat cocok dan dapat diterapkan dengan implementasi KPS yang dilaksanakan di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan bahwa implementasi KPS program BSM di Desa Gumpa sudah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan.

b. Faktor Penghambat Program Bantuan Siswa Miskin

Dari analisa hasil wawancara dengan informan bahwa implementasi program Bantuan Siswa Miskin di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari adanya permasalahan ataupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan seperti :

1) Pendataan kurang akurat.

Rumah tangga miskin yang memiliki peserta didik namun belum terdaftar dan belum mendapatkan BSM.

2) Ketidaktepatan penetapan sasaran BSM.

Tidak tepatnya penerima sasaran BSM seperti ada peserta didik



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

yang berasal dari keluarga yang mampu.

- 3) Penggunaan yang tidak tepat guna. Bantuan Siswa Miskin banyak yang disalahgunakan penggunaannya. Seyogyanya bantuan diperuntukkan untuk membantu kebutuhan sekolah siswa, tetapi digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di rumah.

- c. Hasil yang diharapkan Dari Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin

Implementasi

kebijakan Kartu Perlindungan Sosial Program Bantuan Siswa Miskin di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur diharapkan dapat membantu permasalahan kebutuhan sekolah siswa yang berasal dari Rumah Tangga Miskin seperti untuk membeli sepatu, tas, seragam, buku, dll. Harapan-harapan tersebut akan terwujud apabila

ditunjang dengan pendataan yang akurat, penetapan yang tepat sasaran dan penggunaan yang tepat guna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab IV, maka dalam penulisan penelitian ini

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

penulis dapat menarik kesimpulan yakni : Implementasi Kebijakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) program (Bantuan Siswa Miskin) BSM di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur sudah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan.

Adapun Faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan program ini adalah : (a) Masih adanya pendataan kurang akurat yakni masih ada rumah tangga miskin dan anaknya merupakan peserta didik namun belum terdaftar dan belum mendapatkan BSM. (b) Penggunaan dana BSM yang belum efektif seperti yang diharapkan, seperti dana yang diterima bukan semata untuk kebutuhan pendidikan namun untuk pembelian sembako. Sedangkan Faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan program ini adalah : (a) Kecilnya pendapatan orang tua sehingga membutuhkan adanya program BSM untuk membantu pendidikan anak mereka. (b) Jauhnya jarak dari rumah ke sekolah sehingga membutuhkan transportasi berupa sepeda kayu untuk sampai di sekolah tepat waktu.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil

penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

kemudian diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan Implementasi Kebijakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) program (Bantuan Siswa Miskin) BSM di Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur untuk mendapatkan bantuan tersebut dan mengevaluasi pelaksanaan yang sudah diterapkan. (b) Bagi Ketua RT agar mengetahui secara seksama bagaimana kondisi agar kedepan tidak ada kesalahan dalam pendataan dan penetapan Rumah Tangga Sasaran. (c) Bagi masyarakat agar mempergunakan dana bantuan BSM dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang sasaran yang diinginkan pemerintah, yakni khusus untuk kebutuhan pendidikan bukan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. (d) Bagi program ini diharapkan dilaksanakan terus menerus, namun juga diharapkan dalam penerapannya agar dari pendataan, penetapan bahkan sampai penyaluran tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Subyantoro dan FX.Suwarto. 2007.
Metode & Teknik Penelitian Sosial.
C.V Andi Offset. Yogyakarta.



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur, 2013. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur Tahun 2013. Tamiang Layang.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Di download tanggal 4 Oktober 2015. Pukul 14.00 WITA.
- Haryono, Daniel. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Media Pustaka Phoenix. Jakarta.
- Instruksi Mendagri No. 541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan Pembagian KPS dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Jurnal Administrasi Publik Adi Rahman, dkk. Pengaruh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus di Kelurahan Banyumanik Kota Semarang).
- Jurnal Administrasi Publik Alifiandra Azhar Putri. Efektivitas Kompensasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Buruh Tani Di Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.
- Jurnal Administrasi Publik Sujianto, dkk. Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Penyaluran Raskin di Desa Rantau Baru berjalan dengan kurang baik.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.

Profil Desa Gumpa, 2016.



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi,
2015. Pedoman Penulisan
Skripsi Dan Penulisan Usulan
Penelitian (UP).Tabalong.

Skripsi Yusi Anugrahni. 2014.
Pengaruh Kebijakan
Kompensasi Atas Penyesuaian
Harga Bahan Bakar Minyak
Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Di Kecamatan
Awang Kabupaten Barito
Timur. Tanjung

Sugiyono.

2011.*Metode Penelitian Administrasi*
. Alfabeta. Bandung.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.